

***Collaborative Governance* Dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Syamsudin Lango Kukun¹, Rudi Subiyakto², Edy Akhyary³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang

Abstract

The Lembata Regency Government uses government cooperation as the main method for dealing with natural disasters. The creation of strategic disaster documents such as disaster risk assessment documents and disaster contingency plans shows collaborative Governance successfully handled the disaster in Lembata Regency. This research aims to find out about Collaborative Governance in Natural Disaster Management in Lembata Regency, East Nusa Tenggara. This research uses a qualitative descriptive research method. Primary and secondary data are data sources for this research. Research results (1) indicators of face-to-face dialogue in collaboration are key elements of effective disaster management, (2) indicators of building trust between Stakeholders is an important component to achieve optimal results in mitigation efforts and response to disasters, (3) indicators of commitment to the process become a solid foundation in joint efforts to overcome disasters, (4) indicators of shared understanding are needed to build effective disaster management cooperation and successful in Lembata Regency, (5) interim results indicators of this collaboration have a strategic impact and are an important step towards more effective and successful disaster management in Lembata Regency. In conclusion, to achieve this goal, inclusive and structured collaboration is needed with a clear division of roles and responsibilities.

Keywords: *Natural disasters, Disaster Management, Collaboration*

Pendahuluan

Bencana adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, atau manusia. Peristiwa-peristiwa ini dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan

konsekuensi psikologis. (Puspita et al., 2024).

Tsunami, gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor adalah contoh bencana alam. Bencana alam juga didefinisikan sebagai bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi di alam (Permana, 2023). Dokumentasi yang berkaitan dengan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan gambaran lengkap dari

*) Corresponding Author

Email : rudisubiyaktodap2015@gmail.com

upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko bencana. Ini memberi tahu siapa yang harus melakukan apa untuk menanggulangi bencana dalam jangka waktu tertentu (Juhadi & Herlina, 2020).

Kolaborasi sebagian besar bergantung pada manajemen jaringan sosial. Jaringan sosial membantu pemangku kepentingan berkomunikasi satu sama lain. Didasarkan pada pemahaman ini, teori kolaborasi menganalisis proses tata kelola dari sudut pandang jaringan sosial. Menurut Booher dan Innes, model tata kelola kolaboratif menuntut semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam diskusi di mana mereka dapat menyuarakan kepentingan mereka (Astuti et al., 2020). Sedangkan Kepemimpinan, tata kelola, dan kompetensi diperlukan untuk membuat kolaborasi bekerja, tetapi gagasan ini rentan terhadap konflik dan ketegangan yang berasal dari kekuasaan, ketidakseimbangan, dan logika yang berbeda. menurut Voets dkk (Wijaya et al., 2023)

Seperti yang terlihat dari diskusi awal dan proyek penelitian gelombang pertama, definisi operasional tata kelola kolaboratif saat ini lebih dekat ke lingkaran kehidupan suatu gabungan dari organisasi publik, swasta, dan masyarakat madani yang bekerja sama dalam upaya bersama. *Collaborative governance* mengacu pada keterlibatan berbagai institusi yang tengah dalam memulai inisiatif kerja sama atau bahkan telah memulainya. Konsep ini juga mencakup pemahaman dari masing-masing stakeholder dan institusi tentang cara mencapai tujuan, hasil,

perubahan, dan sebagainya (Kurniawan & Putra, 2020)

Seiring dengan aktivitas manusia dan waktu, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan semakin sering dan semakin parah di berbagai wilayah Indonesia. Ini menyebabkan kerusakan lingkungan semakin parah dari waktu ke waktu.

Meskipun pembangunan Indonesia telah direncanakan dan dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan, prosesnya tetap merusak ekosistem dan lingkungan hidup. Kemajuan yang selama ini bergantung pada transaksi ganda aset normal (terutama untuk lingkup yang sangat besar) telah menyebabkan kekurangan batas angkut aset tersebut untuk kehidupan individu. Kekayaan hutan Indonesia semakin berkurang setiap tahun, sementara pemanfaatan ganda aset mineral menyebabkan kerusakan lingkungan yang seringkali meningkatkan risiko bencana (Arfani, 2022)

Bab 1 Pasal 4 Butir 2 dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2021 menetapkan perencanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk menangani bencana alam. Perencanaan ini mencakup pengkajian ancaman bencana, pengkajian kerentanan dan kapasitas masyarakat daerah, evaluasi kemungkinan dampak bencana, dan penentuan langkah-langkah pengurangan risiko.

Kabupaten Lembata menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021 menyebutkan, bahwa Kabupaten Lembata memiliki Risiko Bencana yang Tinggi. Tidak hanya itu, melalui data Nilai Indeks Risiko yang

dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata pada Tahun 2015 hingga 2021 memiliki Risiko Bencana pada Kelas Tinggi.

Collaborative Governance menjadi salah satu terobosan dari pemerintah dalam mengatasi bencana alam yang terjadi hingga saat ini, dengan mengajak pemerintah selaku kelompok pertama dalam mengatasi bencana alam, dengan tugas sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya, dunia usaha yang bertugas sebagai penyumbang atau investor dalam mengatasi dan membantu kebutuhan yang diperlukan sebelum dan setelah bencana alam terjadi, universitas yakni akademisi dan mahasiswa yang bertugas dalam memberikan solusi teoritis dan menjadi analisator dalam mengkaji lebih dalam mengenai pengentasan bencana alam, organisasi non pemerintah yang berupa kelompok-kelompok peduli akan penanggulanagn bencana alam seperti Pusat Pengendalian Operasi Penanggulanagn Bencana atau PUSDALOPS PB, dan media yang bertugas untuk meliput dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak, berupa berita untuk diketahui masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji kembali bagaimana dan langkah seperti apa yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menanggulangi Bencana Alam yang akan terjadi dengan melakukan penerapan Collaborative Governance. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Collaborative Governance dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara

Timur” sebagai kajian penelitian Tesis peneliti.

Metode Penelitian

Dilihat dari jenis datanya dalam metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Moleong, 2018). Penelitian ini berfokus pada Collaborative Governance Dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan termasuk wawancara, dokumentasi, dan observasi (Rukajat, 2018). Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis data yang melibatkan reduksi data, penyesuaian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Potensi bencana di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori utama: potensi bahaya utama (juga dikenal sebagai bahaya utama) dan potensi bahaya tambahan. Peta rawan bencana menunjukkan daerah rawan gempa, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor sebagai risiko utama. Dampak negatif potensial lainnya termasuk kepadatan pemukiman penduduk yang tinggi dan tingginya persentase bangunan yang terbuat dari kayu, terutama di daerah perkotaan.

Kabupaten Lembata adalah salah satu yang harus dan mampu menerapkan peraturan tersebut. Dengan luas 1.266,40 km², Kabupaten Lembata terdiri dari satu pulau dan terdiri dari sembilan sub-wilayah. Sub-wilayah terbesar, Lokal Lebatukan, memiliki luas 241,64 km² (19%) dan sub-wilayah terkecil, Lokal Ile Chimp Timur, memiliki luas 38,26 km². Lewoleba adalah ibu kota

Kabupaten Lembata, yang terletak di Kecamatan Nubatukan, pada ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Ibu kota distrik adalah Atadei (Kalikasa), yang terletak lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Ibu kota kabupaten adalah Buyasuri (Wiriang), yang berjarak 65,00 kilometer dari ibu kota negara. Bulan hujan di Kabupaten Lembata terjadi dari Januari hingga April, Juni, November, dan Desember. Di bulan Januari, curah hujan tertinggi adalah 360.00 milimeter kubik, dan hari hujan terpanjang adalah 16 hari.

Peraturan Gubernur mengatur penerapan upaya fisik dan nonfisik, pengaturan penanggulangan bencana yang inklusif, pengenaan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana yang inklusif, dan pengembangan budaya yang sadar bencana. Peraturan ini merupakan acuan utama pemerintah dalam menangani bencana alam yang terjadi di kabupaten atau di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Teori *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash digunakan untuk mempelajari proses penanggulangan bencana alam di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teori ini mengemukakan lima variabel kolaborasi: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara (Rusmawan et al., 2023).

Dialog Tatap Muka

Dialog secara pribadi adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses kerja sama. Para pemangku

kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Lembata akan berbicara secara pribadi untuk menentukan tindakan yang harus diambil. Karena manajemen kolaborasi berpusat pada kesepakatan, komunikasi secara langsung adalah tahap penting dari kolaborasi. Komunikasi secara langsung sangat penting untuk membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman yang sama, dan komitmen terhadap proses. Dilakukan diskusi tatap muka tentang penanggulangan bencana untuk membahas hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan bersama di Kabupaten Lembata. Dengan adanya dialog tatap muka akan memudahkan dalam membangun kepercayaan dan saling pengertian, dalam hal ini adanya musyawarah dan terdapat proses komunikasi maupun negosiasi. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pertemuan antar pihak Pemerintah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berperan sebagai *leading sector* dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Contoh kolaborasi yang disebutkan adalah penanganan bencana erupsi pada tahun 2021, di mana Dinas Pekerjaan Umum (PU) bekerjasama dengan Dinas Penanganan Bencana membentuk posko di depan Kantor Dinas PU. Proses identifikasi kerusakan infrastruktur, seperti jalan, gedung, air minum, dan sanitasi, dilakukan dengan tim yang terorganisir. Kolaborasi melibatkan persiapan sarana dan prasarana, khususnya alat berat, untuk mendukung tindakan tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana

Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan terjadi ketika dua atau lebih orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi antar pemangku kepentingan adalah langkah pertama menuju pembentukan kepercayaan, yang akan berkembang seiring dengan keterlibatan semua pihak. Dalam pertemuan, kerja sama, atau percakapan tatap muka, masing-masing pihak dapat membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan mampu mencapai tujuan mereka. Meskipun masyarakat Lembata percaya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ada beberapa hal yang kadang-kadang menghalangi masyarakat untuk mendukung sepenuhnya upaya mitigasi bencana. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Keberhasilan bergantung pada komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam proses kerja sama. Komitmen ini memotivasi untuk lebih banyak terlibat dalam kerja sama pemerintahan, mengurangi risiko, dan bekerja sama dengan berbagai institusi. Membangun kepercayaan di antara semua pihak yang bekerja sama sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Keyakinan ini membantu menangani perbedaan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dalam penanggulangan bencana.

Komitmen Terhadap Proses

Adanya kesepakatan untuk bekerja sama dalam proses untuk mencapai tujuan tertentu disebut

komitmen pada proses. Para pemangku kepentingan berkomitmen satu sama lain untuk mengatasi masalah dan mencari solusi. Motivasi awal untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi terkait erat dengan komitmen.

Pada tahap komitmen pada proses, pemangku kepentingan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak lain di Kabupaten Lembata berdasarkan pembagian peran, tanggung jawab, dan fungsi yang jelas. Dokumen resmi yang disahkan menjadi landasan untuk kerjasama ini. BPBD bersikap terbuka terhadap kerjasama dengan pihak dunia usaha dan lembaga swasta. Keterlibatan stakeholder lainnya juga mencakup peningkatan sumber daya manusia dan membangun jejaring yang kuat dalam kerangka multi-pihak dan multi-sektor. Dinas Sosial berperan dalam bidang dapur umum, khususnya dalam tanggap cepat, sedangkan BPBD fokus pada penanganan bencana secara umum. Komunikasi terjaga melalui pertemuan dan surat-menyurat secara rutin.

Para pemangku kepentingan di Kabupaten Lembata memiliki komitmen yang kuat dan seragam dalam menanggulangi bencana. Kerjasama yang dibangun dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing pihak, menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama berarti bahwa saling memahami dan memahami apa yang dimaksud dengan forum ini sangat penting. Agar cita-cita yang diinginkan bersama dapat dicapai, perlu ada kesatuan dalam hal visi, misi, dan tujuan. Selain itu, memahami masalah yang sebenarnya terjadi dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Lembata adalah cara lain untuk mencapai pemahaman bersama.

Pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan merupakan aspek kritis dalam penanggulangan bencana. Forum diskusi dan keputusan bersama menjadi sarana untuk mencapai pemahaman yang seragam dan saling menghargai. Kerjasama antar lembaga, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan stakeholder lainnya melibatkan pembagian peran, tanggung jawab, dan fungsi yang jelas. Keputusan yang diambil oleh pemerintah, termasuk keputusan bupati, diimplementasikan secara administratif dan teknis oleh BPBD. Meskipun dengan keterbatasan sumber daya, BPBD telah mengambil langkah-langkah untuk membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

Hasil Sementara

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika ada kemungkinan "kemenangan kecil" dan tujuan dan keuntungan yang diharapkan relatif konkret, kolaborasi

lebih mungkin terjadi. Peneliti menggambarkan temuan ini sebagai hasil dari proses yang sangat penting untuk menciptakan momentum yang dapat mendorong kerja sama yang sukses. Namun, temuan ini mungkin hanya representasi dari hasil sebenarnya. Memberi umpan balik tentang bagaimana tim bekerja, yang mendorong siklus yang baik untuk menumbuhkan komitmen dan kepercayaan.

Hasil wawancara dengan semua pihak menunjukkan bahwa hasil sementara dari proses kolaborasi antar peran pemangku kepentingan penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Lembata menunjukkan dampak strategis dan keuntungan. Kajian Risiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Kontingensi (RENKON) Bencana Erupsi Gunung Api Ile Lewotolo, dan Dokumen Rencana Operasi (RENOPS) Bencana Erupsi Gunung Api Ile Lewotolo adalah beberapa dokumen kebencanaan yang dibuat selama proses ini. Pendanaan adalah masalah penting dalam pelaksanaan tugas, menurut persepsi di bidang penanggulangan bencana. Keterbatasan dana masih menjadi masalah yang perlu diatasi, meskipun telah ada bantuan nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai *Collaborative Governance* Dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertama, 1. Salah satu langkah penting dalam proses kerja

sama adalah dialog tatap muka, terutama dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Lembata. Komunikasi tatap muka dianggap penting untuk mencapai kesepakatan, menumbuhkan kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Dalam penanggulangan bencana, dialog tatap muka digunakan untuk membahas perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini memudahkan membangun kepercayaan dan pemahaman melalui komunikasi, musyawarah, dan negosiasi. Wawancara dengan pihak terkait, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menunjukkan bahwa pertemuan antar pihak pemerintah sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Sebagai contoh, untuk menangani bencana erupsi pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Penanganan Bencana bekerja sama. Mereka membentuk posko, menemukan kerusakan infrastruktur, dan bekerja sama untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk membantu tindakan tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana

Kedua, Membangun kepercayaan: bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama adalah penting. Langkah pertama dalam membangun kepercayaan adalah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Melalui pertemuan dan diskusi secara langsung, kelompok yang bekerja sama dapat saling mengenal, menunjukkan kesetiaan, dan membangun kepercayaan. Meskipun masyarakat Lembata percaya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Lembata, ada beberapa hal yang dapat menghalangi mereka untuk mendukung sepenuhnya upaya untuk menghentikan bencana. Masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, keberhasilan bergantung pada komitmen yang teguh dari semua orang yang terlibat dalam proses kerja sama. Orang-orang ini harus ingin terlibat secara aktif dalam kerja sama pemerintahan, mengelola risiko, dan mengelola ketidaksepakatan di antara institusi yang terlibat. Untuk mencapai kesuksesan, semua pihak yang bekerja sama harus percaya satu sama lain. Pemangku kepentingan penanggulangan bencana juga harus percaya satu sama lain untuk mencapai hasil yang optimal dalam mitigasi dan respons terhadap bencana karena kepercayaan membantu mengatasi perbedaan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.

Ketiga, Untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana yang diinginkan, pemangku kepentingan harus berkomitmen pada proses kolaborasi, yang merupakan kesepakatan antara mereka untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah dan mencari solusi bersama. Pada tahap komitmen pada proses, para pemangku kepentingan di Kabupaten Lembata, terutama BPBD, bekerja sama dengan stakeholder lainnya berdasarkan pembagian peran, tugas, dan fungsi yang jelas. Adanya kerangka kerja yang terstruktur ditunjukkan oleh adanya dokumen resmi yang berfungsi sebagai landasan kerja sama. Sikap terbuka BPBD terhadap kerjasama dengan lembaga swasta dan dunia

usaha menunjukkan bahwa proses kolaborasi inklusif. Sangat penting bagi pemangku kepentingan untuk terus berkomunikasi dan berbagi informasi melalui pertemuan dan surat-menyurat. Pembangunan sumber daya manusia yang lebih besar dan pembentukan jaringan yang kuat dalam konteks multi-sektor dan multi-pihak juga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan berbagai pihak terkait. Proses penanggulangan bencana di Kabupaten Lembata sangat bervariasi dan konsisten, menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memiliki komitmen yang kuat dan konsisten.

Keempat, Upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Lembata bergantung pada kesepakatan. Para pemangku kepentingan dapat mencapai kesepakatan dan rasa hormat satu sama lain melalui forum diskusi dan proses pengambilan keputusan. Selain mencapai kesepakatan tentang definisi masalah yang sebenarnya, pemahaman bersama juga melibatkan penyatuan tujuan, visi, dan misi. Dalam penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak berwenang lainnya memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas. Meskipun memiliki sumber daya yang terbatas, BPBD telah melakukan upaya administratif dan teknis untuk menerapkan keputusan pemerintah, termasuk keputusan bupati. Selain itu, BPBD telah meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Untuk menjaga konsistensi dalam penanggulangan bencana, pemahaman bersama ini sangat penting. Forum tersebut

digunakan untuk mencapai kesepakatan tentang tindakan konkret yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kelima, Kolaborasi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lembata dapat menghasilkan manfaat yang signifikan dan manfaat jangka panjang. Hasil wawancara dengan semua pihak menunjukkan bahwa berbagai dokumen kebencanaan, termasuk Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Kontingensi (RENKON) Bencana Erupsi Gunung Api Ile Lewotolo, dan Dokumen Rencana Operasi (RENOPS) Bencana Erupsi Gunung Api Ile Lewotolo, telah dibuat melalui kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lembata. Pendanaan diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penanggulangan bencana, dan meskipun telah ada bantuan dari pemerintah nasional, jumlah dana yang terbatas masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Kemenangan kecil membangun kepercayaan dan komitmen, menurut persepsi di bidang penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil sementara dari kerja sama ini memiliki konsekuensi strategis dan merupakan langkah penting menuju penanggulangan bencana yang lebih berhasil dan efisien di Kabupaten Lembata.

Daftar Referensi

Arfani, M. (2022). Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *Jurnal*

- Syntax Transformation*, 3(1), 104–120.
<https://doi.org/10.46799/journalsyntaxtransformation.v3i1.497>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (T. D. Press (ed.)). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Juhadi, & Herlina, M. (2020). *Pendidikan Literasi Mitigasi Bencana Di Sekolah*. Parist Penerbit.
- Kurniawan, H., & Putra, D. T. F. (2020). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Waduk Sei Pulai di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 2(1), 12.
- Moleong, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Permana, D. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 158.
- Puspita, S., Junadi, & Wulandari, S. (2024). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Rusmawan, T., Hamid, S., & Santoso, J. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Penanggulangan Bencana Alam di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 7(1).
- Wijaya, A. A. M., Sa'ban, L. M. A., & Nastia. (2023). Peluang Dan Tantangan Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pariwisata Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 220.